



**PUTUSAN**

Nomor 6500/Pdt.G/2014/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:-----

----- pemohon

**MELAWAN**

----- TERMohon

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6500/Pdt.G/2014/PA.Jr telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Februari 2014, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 084/054/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan;-----
- Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama  $\pm$  7 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon sudah mempunyai 1 orang anak nama ANAK I umur 2 bulan, ikut Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak  $\pm$  3 bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon saling tidak krasan tinggal dirumah mertua dikarenakan berat meninggalkan orang tua masing-masing, hal itulah yang menjadikan rumah tangga tidak harmonis;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit Pemohon sejak  $\pm$  3 bulan dan sekarang berada dirumah alamat tersebut diatas;
- Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah  $\pm$  3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

----- Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;-----

-----Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

----- Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan Pencatatan Sipil kabupaten Jember (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 084/054/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember tanggal 17 Februari 2014 (P.2)

----- Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

-----Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

## 1. SAKSI I

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi ayah kandung pemohon;
- Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon sudah mempunyai 1 orang anak nama ANAK I umur 2 bulan, ikut Pemohon;
- Saksi tahu kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah rumah sejak  $\pm$  3 bulan hingga sekarang ini sudah  $\pm$  3 bulan dan penyebab perkecokan mereka itu karena masalah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon saling tidak krasan tinggal dirumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua dikarenakan berat meninggalkan orang tua masing-masing, hal itulah yang menjadikan rumah tangga tidak harmonis;

- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit Pemohon sejak  $\pm$  3 bulan dan sekarang berada dirumah alamat tersebut diatas;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

## 2. SAKSI II;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon sudah mempunyai 1 orang anak nama ANAK I umur 2 bulan, ikut Pemohon;
- Namun kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak  $\pm$  3 bulan hingga sekarang selama  $\pm$  3 bulan dan penyebab percekcoan itu karena masalah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon saling tidak krasan tinggal dirumah mertua dikarenakan berat meninggalkan orang tua masing-masing, hal itulah yang menjadikan rumah tangga tidak harmonis;-----
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit Pemohon sejak  $\pm$  3 bulan dan sekarang berada dirumah alamat tersebut diatas;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai dari istrinya itu yaitu bernama TERMOHON ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;-----

----- Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan mohon putusan;-----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal hal sebagaimana tercantum dalam BERITA ACARA SIDANG perkara ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

----- Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah  $\pm$  7 bulan tahun hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon saling

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak krasan tinggal dirumah mertua dikarenakan berat meninggalkan orang tua masing-masing, hal itulah yang menjadikan rumah tangga tidak harmonis;

----- Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap ;

----- Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

----- Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama  $\pm$  3 bulan, telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

-----Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

-----Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

-----Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath-Tholaq Minasy Syariat Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 :

**فيها ينفع لم و الزوجين حياة تضطرب حين الطلاق نظام الاسلام اختار قد و استمرار لان روح غير من صورة الزوجين الرابطة تصبح حين و صلح لا و نصح العدالة روح تاءباه هذا و المؤيد بالسجن الزوجين احد على يحكما ان معناه**

Artinya : "Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah"

firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227:

**عليهم سميع لله فان الطلاق عزموا وان**

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

**بالبينة اثباته جاز غيبة او توار او بتعزز تعزز فاعن**

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

-----Menimbang, bahwa putusnya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

-----Menimbang, bahwa dengan menganalogkan kepada maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

-----Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon(pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jember ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361000.- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1436 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H. ACH. ZAYYADI, SH sebagai Ketua Majelis, H. ALI SUWANDI S, SH serta Drs. SUYADI, MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. SUFIYANI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Majelis I

Drs. H. ACH. ZAYYADI, SH

ALI SUWANDI S,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH

Hakim Anggota II

~~D~~anitera Pengganti,

SUYADI,

MH

--

Saksi ARLENA Binti MA'RUF

Bahwa saksi selaku Kepala SDN No. 87 / VI Kandang I pernah mendapatkan Dana DAK TA 2009 sebesar Rp.199.920.000.- (Seratus sembilan puluh Sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa Dana DAK TA 2009 tersebut dipergunakan untuk Rehab kelas dan untuk pembelian Meubeler ;

Bahwa DAK TA 2009 di sekolah yang saksi kepalai cair dalam 3 (tiga) tahap tahap pertama 30 %, tahap kedua 45 % dan tahap ketiga 25 %

Bahwa dari pencairan DAK 2009 saksi pernah menyetorkan uang kepada Dinas Pendidikan Kab Merangin melalui terdakwa sebesar 10 % dari setiap tahap pencairan yaitu yang pertama sebesar Rp.5.150.000.- dan Pencairan yang kedua sebesar Rp.7.700.000.- dan pencairan yang ketiga Rp.4.200.000 ;

Bahwa proyek DAK TA 2009 di sekolah saksi sudah selesai dilaksanakan sesuai RAB;

Bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Perjanjian Hibah dan Surat Perintah Kerja ;

Bahwa dalam Surat Perjanjian Hibah dan Surat Perintah Kerja tidak ada keharusan menyetorkan 10 % dari DAK TA 2009 tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu, amplop dan secarik kertas (barang bukti) tersebut adalah tanda setoran saksi kepada terdakwa ;

Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan di ruang kerja kepala dinas Pendidikan Kabupaten Merangin sehubungan dengan pelaksanaan dana DAK TA 2009 ;

Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut Fauzi, SPd selaku kepala dinas Pendidikan Kabupaten Merangin dan ada sekitar 30 orang kepala sekolah yang menerima DAK TA 2009 ;

Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi tidak mendengar ada pembicaraan mengenai setoran 10 % dari pencairan DAK 2009;

Bahwa saksi mengetahui adanya setoran 10 % tersebut dari Ketua kelompok wilayah II yaitu Edi Warman yang katanya setoran tersebut harus disetor melalui Terdakwa ;

Bahwa saksi juga pernah ditelpon oleh Terdakwa untuk setor 10 % setelah pencairan DAK 2009

Bahwa saksi keberatan dengan adanya setoran kepada terdakwa tersebut

Bahwa saksi mau menyetorkan uang kepada terdakwa karena takut kepada atasan dan teman-teman kepala sekolah yang menerima DAK TA 2009 sudah banyak yang setor ;

Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang setoran tersebut

Bahwa dengan adanya setoran tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan ;

Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan yang mana isi Surat Pernyataan tersebut adalah intinya tidak adanya potongan dalam pencairan DAK 2009;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi MUSLIKHUL HADI Bin MUNAWIR

Bahwa saksi selaku Kepala SDN No. 170 / VI Rasau I pernah mendapatkan Dana DAK TA 2009 sebesar Rp.299.880.000.- (Dua ratus sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Dana DAK TA 2009 tersebut dipergunakan untuk Rehab kelas dan untuk pembelian Meubeler ;

Bahwa Dana DAK TA 2009 di sekolah yang saksi kepalai cair dalam 3 (tiga) tahap tahap pertama 30 %, tahap kedua 45 % dan tahap ketiga 25 %

Bahwa saksi pernah menyetorkan uang Dinas Pendidikan Merangin melalui sdr Mirzalina sebesar 10 % dari setiap tahap pencairan ;

Bahwa proyek DAK TA 2009 di sekolah saksi sudah selesai dilaksanakan sesuai RAB;

Bahwa yang saksi setorkan kepada Mirzalina yaitu 10 % pada setiap tahap pencairan setoran yang pertama sebesar Rp.7.700.000.- dan Pencairan yang kedua sebesar Rp.11.600.000.- dan pencairan yang ketiga Rp.6.400.000 ;

Bahwa uang yang saksi setorkan tersebut saksi ambil dari dana DAK TA 2009 ;

Bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Perjanjian Hibah dan Surat Perintah Kerja ;

Bahwa dalam Surat Perjanjian Hibah dan Surat Perintah Kerja tidak ada keharusan menyetorkan 10 % dari DAK TA 2009 tersebut ;

Bahwa saksi tahu amplop dan secarik kertas (barang bukti) tersebut adalah tanda setoran saksi kepada sdr Mirzalina ;

Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan diruang kerja kepala dinas Pendidikan Kabupaten Merangin sehubungan dengan pelaksanaan dana DAK TA 2009 ;

Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut Fauzi, SPd selaku kepala dinas Pendidikan Kabupaten Merangin dan ada sekitar 30 orang kepala sekolah yang menerima DAK TA 2009 ;

Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi tidak mendengar ada pembicaraan mengenai setoran 10 % ;

Bahwa saksi mengetahui adanya setoran 10 % tersebut dari Ketua kelompok wilayah I yaitu Sadi ;

Bahwa saksi keberatan dengan adanya setoran tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mau menyetorkan uang kepada sdr Mirzalina karena takut kepada atasan dan teman-teman kepala sekolah yang menerima DAK TA 2009 sudah banyak yang setor ;

Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang setoran tersebut ;

Bahwa dengan adanya setoran tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan ;

Bahwa saksi mengetahui berapa jumlah uang yang harus saksi setorkan kepada sdr Mirzalina karena sebelum saksi setor saksi bertanya terlebih dahulu kepada sdr Mirzalina ;

Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisi pernyataan tidak ada pemotongan dalam pencairan dana DAK 2009;

Bahwa yang menyuruh saksi membuat Surat Pernyataan bermaterai tersebut adalah sdr Mirzalina ;

Bahwa saksi membuat Surat Pernyataan tersebut setelah melakukan penyetoran yang pertama ;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

Saksi BASARUDIN Bin RAMLI

Bahwa saksi selaku Kepala SDN No. 81 / VI Beringin Sanggul pernah mendapatkan Dana DAK TA 2009 sebesar Rp.299.880.000.- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa Dana DAK TA 2009 tersebut dipergunakan untuk Rehab kelas dan untuk pembelian Meubeler ;

Bahwa Dana DAK TA 2009 di sekolah yang saksi kepalai cair dalam 3 (tiga) tahap tahap pertama 30 %, tahap kedua 45 % dan tahap ketiga 25 % :

Bahwa saksi pernah menyetorkan uang ke Dinas Pendidikan Merangin melalui sdr Mirzalina sebesar 10 % dari setiap tahap pencairan dana DAK 2009

Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uang yang saksi setorkan tersebut ;

Bahwa yang saksi setorkan kepada terdakwa yaitu 10 % pada setiap tahap pencairan setoran yang pertama sebesar Rp.7.700.000.- dan Pencairan yang kedua sebesar Rp.11.600.000.- dan pencairan yang ketiga Rp.6.400.000.- ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang saksi setorkan kepada Mirzalina saksi ambil dari dana DAK TA 2009 ;

Bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Perjanjian Hibah dan Surat Perintah Kerja ;

Bahwa dalam Surat Perjanjian Hibah dan Surat Perintah Kerja tidak ada keharusan menyetorkan 10 % dari DAK TA 2009 tersebut ;

Bahwa saksi tahu amplop dan secarik kertas (barang bukti) tersebut adalah tanda setoran saksi kepada Mirzalina ;

Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan di aula kantor dinas Pendidikan Kabupaten Merangin sehubungan dengan pelaksanaan dana DAK TA 2009 ;

Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut Fauzi, SPd selaku kepala dinas Pendidikan Kabupaten Merangin dan ada sekitar 30 orang kepala sekolah yang menerima DAK TA 2009 serta kepala DPKAD, Taswin Indra, Guntur dan sdr Mirzalina ;

Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi tidak mendengar ada pembicaraan mengenai setoran 10 % tersebut ;

Bahwa saksi mengetahui adanya setoran 10 % tersebut dari Sadi ketua kelompok wilayah I;

Bahwa saksi keberatan dengan adanya setoran tersebut ;

Bahwa saksi mau menyetorkan uang kepada sdr Mirzalina karena takut kepada atasan dan teman-teman kepala sekolah yang menerima DAK TA 2009 sudah banyak yang setor;

Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan yang mana isi Surat Pernyataan tersebut adalah intinya tidak adanya potongan ;

Bahwa yang menyuruh saksi membuat Surat Pernyataan bermaterai tersebut adalah sdr Mirzalina ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi SUHARNO Bin SUBANDI

Bahwa saksi selaku Kepala SDN No. 248 / VI Sungai Putih I pernah mendapatkan Dana DAK TA 2009 sebesar Rp.299.880.000.- (Dua ratus sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dana DAK TA 2009 tersebut dipergunakan untuk Rehab kelas dan untuk pembelian Meubeler ;

Bahwa Dana DAK TA 2009 di sekolah yang saksi kepalai cair dalam 3 (tiga) tahap tahap pertama 30 %, tahap kedua 45 % dan tahap ketiga 25 % :

Bahwa saksi pernah menyetorkan uang ke Dinas Pendidikan Merangin melalui sdr Mirzalina sebesar 10 % dari setiap tahap pencairan dana DAK 2009

Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uang yang saksi setorkan tersebut ;

Bahwa dana DAK TA 2009 di sekolah saksi sudah selesai dilaksanakan sesuai RAB;

Bahwa yang saksi setorkan kepada Mirzalina yaitu 10 % pada setiap tahap pencairan setoran yang pertama sebesar Rp.7.700.000.- dan Pencairan yang kedua sebesar Rp.11.600.000.- dan pencairan yang ketiga Rp.6.400.000 ;

Bahwa uang yang saksi setorkan tersebut saksi ambil dari dana DAK TA 2009 ;

Bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Perjanjian Hibah dan Surat Perintah Kerja ;

Bahwa dalam Surat Perjanjian Hibah dan Surat Perintah Kerja tidak ada keharusan menyetorkan 10 % dari DAK TA 2009 tersebut ;

Bahwa saksi tahu amplop dan secarik kertas (barang bukti) tersebut adalah tanda setoran saksi kepada sdr Mirzalina ;

Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan di ruang kerja kepala dinas Pendidikan Kabupaten Merangin sehubungan dengan pelaksanaan dana DAK TA 2009 ;

Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut Fauzi, SPd selaku kepala dinas Pendidikan Kabupaten Merangin dan ada sekitar 30 orang kepala sekolah yang menerima DAK TA 2009 ;

Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi tidak mendengar ada pembicaraan mengenai setoran 10 % ;

Bahwa Saksi mengetahui adanya setoran 10 % tersebut dari Ketua kelompok wilayah I yaitu Sadi dan juga ada diberitahu oleh Sdri Mirzalina untuk setor 10 % tersebut;

Bahwa saksi keberatan dengan adanya setoran tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi mau menyetorkan uang kepada terdakwa karena takut kepada atasan dan teman-teman kepala sekolah yang menerima DAK TA 2009 sudah banyak yang setor ;

Bahwa dengan adanya setoran tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek DAK 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)